

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2019  
NOMOR : SP DIPA- 013.05.2.408774/2019**

**Revisi ke 02**  
Tanggal : 30 April 2019

**A. Dasar Hukum:**

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 12 Tahun 2018 tentang APBN TA 2019

**B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:**

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
2. Unit Organisasi : (05) DITJEN PEMASYARAKATAN
3. Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
4. Kode/Nama Satker : (408774) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG
- Sebesar : Rp. 874.552.000 ( DELAPAN RATUS TUJUH PULUH EMPAT JUTA LIMA RATUS LIMA PULUH DUA RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN  
03.05 LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.05.08 Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan  
013.05.08.5252 Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah

	Jumlah Uang
Rp.	874.552.000
Rp.	874.552.000

**C. Sumber Dana Berasal Dari :**

1. Rupiah Murni	Rp.	874.552.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP			- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

**D. Pencairan dana dilakukan melalui :**

1. KPPN MAKASSAR II (136) Rp. 874.552.000

**E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)**

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Jakarta, 05 Desember 2018  
A.N MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ASKOLANI  
NIP. 196606111992021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2019  
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408774/2019  
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:5516-1033-0217-5302

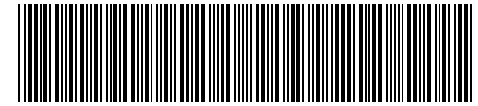
Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (05) DITJEN PEMASYARAKATAN  
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN  
Kode>Nama Satker : (408774) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG

Kuasa Pengguna Anggaran : Drs. Priyadi, Bc.IP., M.Si.  
Bendahara Pengeluaran : SAFRI  
Pejabat Penanda Tangan SPM : Ir. H. ABD. RAHMAN L. MH

Halaman : IA.1

1 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN			874.552.000
Sub Fungsi	03.05	LEMBAGA PEMASYARAKATAN			874.552.000
2 Program	013.05.08	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan			874.552.000
Sasaran Program	01	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan			
	02	Meningkatnya Produktivitas Narapidana/Anak dan Klien Pemasyarakatan Menuju Manusia Mandiri			
	03	Meningkatnya Ketaatan Hukum Mantan Narapidana, Anak dan Klien Pemasyarakatan			
Indikator Kinerja Program	01	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemasyarakatan	90	Persen	
	01	Persentase Narapidana/Anak dan Klien Pemasyarakatan yang Berdaya Guna Setelah Bebas	15,2	Persen	
	01	Menurunnya Persentase Residivis	9,8	Persen	
Output Program	01	Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana			
Indikator Output Program	01	Persentase tahanan yang mendapatkan layanan tahanan sesuai standar	90	Persen	
	02	Persentase narapidana yang mendapatkan layanan pembinaan narapidana sesuai standar	90	Persen	
	03	Persentase Narapidana/Tahanan/Anak yang mendapatkan layanan perawatan sesuai standar	90	Persen	
	04	Persentase basan baran yang dikelola sesuai standar	90	Persen	
	05	Persentase gangguan Keamanan yang di tindak dan ditanggulangi sesuai standar	90	Persen	
	06	Persentase Klien yang mendapatkan layanan pembimbingan klien pemasyarakatan sesuai standar	90	Persen	
	07	Persentase anak yang mendapatkan layanan pendidikan dan pengentasan sesuai standar	90	Persen	
Kegiatan	5252	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah			874.552.000
Sasaran Kegiatan	01	Meningkatnya penyelenggaraan pembinaan UPT Pemasyarakatan di wilayah			
	02	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan di wilayah sesuai standar			
	03	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar			
	04	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Narapidana di wilayah sesuai standar			
	05	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar			
	06	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar			
	07	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan di wilayah sesuai standar			
	08	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar			
	09	Layanan Internal (Overhead)			
	10	Layanan Perkantoran			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2019  
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408774/2019  
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:5516-1033-0217-5302

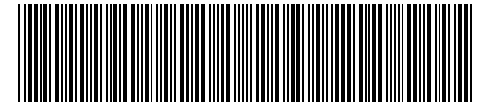
Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (05) DITJEN PEMASYARAKATAN  
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN  
Kode>Nama Satker : (408774) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG

Kuasa Pengguna Anggaran : Drs. Priyadi, Bc.IP., M.Si.  
Bendahara Pengeluaran : SAFRI  
Pejabat Penanda Tangan SPM : Ir. H. ABD. RAHMAN L. MH

Halaman : IA.2

Sasaran Kegiatan	11	Meningkatnya Kapasitas Hunian
	12	Terselenggaranya Dukungan Layanan Manajemen Eselon I
Indikator Kinerja Kegiatan	01	Persentase UPT Masyarakat di wilayah yang disupervisi dalam pelaksanaan tugas masyarakat di wilayah sesuai standar
	01	Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan sesuai standar
	02	Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan dasar, lanjutan dan penyuluhan kesehatan sesuai standar
	03	Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan khusus dan rehabilitasi sesuai standar
	04	Jumlah narapidana narkoba yang memperoleh layanan rehabilitasi
	01	Persentase Tahanan yang mendapatkan pelayanan administrasi tahanan, bantuan hukum dan bimbingan kegiatan sesuai standar
	01	Persentase Narapidana yang mendapatkan pembinaan kepribadian sesuai standar
	02	Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan administrasi narapidana sesuai standar
	03	Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan integrasi (Asimilasi, PB, CB, CMB) dan pendayagunaan TPP sesuai standar
	04	Persentase Narapidana yang mendapatkan latihan keterampilan dan kegiatan kerja produksi sesuai standar
	01	Persentase basan baran yang mendapatkan pelayanan administrasi dan pengelolaan basan baran sesuai standar
	01	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar
	02	Persentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar
	03	Persentase gangguan Keamanan yang ditindak dan ditanggulangi sesuai standar
	01	Persentase klien yang mendapatkan pelayanan registrasi sesuai standar
	02	Persentase klien yang mendapatkan pembimbingan dan Pengawasan sesuai standar
	03	Persentase anak yang mendapatkan pendampingan anak sesuai standar
	01	Persentase anak yang mendapatkan pelayanan registrasi sesuai standar
	02	Persentase anak yang mendapatkan pendidikan, pelatihan keterampilan dan pengentasan anak sesuai standar
	01	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel dan tepat waktu
	02	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan yang sesuai standar

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2019  
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408774/2019  
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:5516-1033-0217-5302

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (05) DITJEN PEMASYARAKATAN  
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN  
Kode>Nama Satker : (408774) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG

Kuasa Pengguna Anggaran : Drs. Priyadi, Bc.IP., M.Si.  
Bendahara Pengeluaran : SAFRI  
Pejabat Penanda Tangan SPM : Ir. H. ABD. RAHMAN L. MH

Halaman : IA.3

Indikator Kinerja Kegiatan	03	Tersediannya data pegawai pemasyarakatan sesuai dengan kompetensi				
	04	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu				
	05	Jumlah Kendaraan Bermotor				
	06	Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi				
	07	Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran				
	08	Jumlah Gedung/Bangunan				
	01	Jumlah Layanan Perkantoran				
	01	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP)				
	02	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)				
	03	Jumlah UPT Pembangunan Balai Pemasyarakatan (Bapas)				
	04	Jumlah UPT Rehabilitasi/Renovasi Lapas/Rutan				
	01	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel dan tepat waktu				
	02	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan yang sesuai standar				
	03	Tersediannya data pegawai pemasyarakatan sesuai dengan kompetensi				
	04	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu				
	Output Kegiatan	5252.003	Pembinaan UPT Pemasyarakatan	28,003 UPT		808.042.000
	Indikator Output Kegiatan	01	Persentase UPT Pemasyarakatan di wilayah yang disupervisi dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan di wilayah sesuai standar	90	%	
Output Kegiatan	5252.016	Pembinaan Masyarakat mengenai Pelaksanaan Undang-undang no 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak [PN]	1 Wilayah		66.510.000	
Indikator Output Kegiatan	01	Pemahaman masyarakat terkait Undang-undang no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak	14	Wilayah		

Jakarta, 05 Desember 2018  
Direktur Jenderal Pemasyarakatan

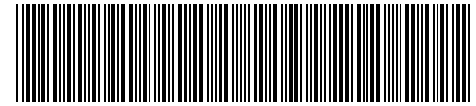
ttd.  
Sri Puguh Budi Utami  
NIP 196207021987032001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**

**TAHUN ANGGARAN 2019**

**NOMOR : DIPA- 013.05.2.408774/2019**

**I B. SUMBER DANA**



DS:5516-1033-0217-5302

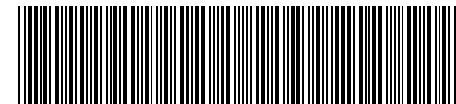
Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 Unit Organisasi : (05) DITJEN PEMASYARAKATAN  
 Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN  
 Kode>Nama Satker : (408774) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG

		Pagu	Ekuivalen Rupiah		
1. Anggaran Tahun 2019	Rp.	874.552.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	874.552.000		(2) RPLN	US\$ 0 Rp. 0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR 0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2019  
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408774/2019  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:5516-1033-0217-5302

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (05) DITJEN PEMASYARAKATAN  
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN  
Kode>Nama Satker : (408774) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
408774	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG	-	874.552	-	-	-	874.552		
013.05.08	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan	-	874.552	-	-	-	874.552		
5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	-	874.552	-	-	-	874.552		
5252.003	Pembinaan UPT Pemasarakatan	-	808.042	-	-	-	808.042	19 . 51	
01	RM	-	808.042	-	-	-	808.042	136	
5252.016	Pembinaan Masyarakat mengenai Pelaksanaan Undang-undang no 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak [PN]	-	66.510	-	-	-	66.510	19 . 51	
01	RM	-	66.510	-	-	-	66.510	136	
<b>JUMLAH</b>		-	874.552	-	-	-	874.552		

Jakarta, 05 Desember 2018  
Direktur Jenderal Pemasarakatan

ttd.  
Sri Puguh Budi Utami  
NIP 196207021987032001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2019  
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408774/2019  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:5516-1033-0217-5302

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (05) DITJEN PEMASYARAKATAN  
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN  
Kode>Nama Satker : (408774) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG

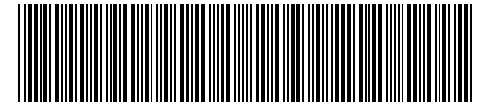
Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	408774	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG													
		<b>RENCANA PENARIKAN DANA</b>	0	109.443	256.132	230.012	45.940	15.765	73.880	35.115	19.382	31.166	29.414	28.303	874.552
		<b>52 BELANJA BARANG</b>	0	109.443	256.132	230.012	45.940	15.765	73.880	35.115	19.382	31.166	29.414	28.303	874.552
013.05.08.5252		Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	0	109.443	256.132	230.012	45.940	15.765	73.880	35.115	19.382	31.166	29.414	28.303	874.552
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	109.443	256.132	230.012	45.940	15.765	73.880	35.115	19.382	31.166	29.414	28.303	874.552

Jakarta, 05 Desember 2018  
Direktur Jenderal Pemasyarakatan

ttd.  
Sri Puguh Budi Utami  
NIP 196207021987032001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2019  
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408774/2019  
IV A. B L O K I R**



DS:5516-1033-0217-5302

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [05] DITJEN PEMASYARAKATAN  
Provinsi : [19] SULAWESI SELATAN  
Kode dan Nama Satker : [408774] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG

Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

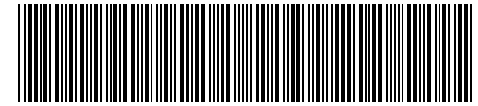
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 05 Desember 2018  
Direktur Jenderal Pemasyarakatan

ttd.  
Sri Puguh Budi Utami  
NIP 196207021987032001



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2019  
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408774/2019  
IV B. C A T A T A N**



DS:5516-1033-0217-5302

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [05] DITJEN PEMASYARAKATAN  
Provinsi : [19] SULAWESI SELATAN  
Kode dan Nama Satker : [408774] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 05 Desember 2018  
Direktur Jenderal Pemasyarakatan

ttd.  
Sri Puguh Budi Utami  
NIP 196207021987032001